

Identifikasi Risiko Kemitraan Inspektorat Daerah dengan Aparat Penegak Hukum

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Provinsi DIY Nama OPD : Inspektorat Daerah Tahun Penilaian : 2024 Tujuan Strategis : Terwujudnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah yang handal Sasaran strategis OPD : Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Meningkat : Akuntabilitas Kinerja PD Meningkat Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Umum											
No	Program/Kegiatan	Indikator Keluaran	Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/U/C	Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1	Kemitraan Inspektorat Dengan Aparat Penegak Hukum	penanganan laporan dan /atau pengaduan masyarakat dengan indikasi tindak pidana korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul	Pelaksanaan	Keterbatasan kapasitas pengawasan	ROO.24.35.03.01	Inspektur	Kurangnya sumber daya Tim Investigasi	Internal	C	penyelesaian penanganan aduan tidak tepat waktu	Inspektorat Daerah, Pemerintah Daerah
			Pelaksanaan	Pihak yang diperiksa tidak kooperatif	ROO.24.35.03.02	Inspektur	Kebutuhan data berkenaan dengan pihak ketiga	Internal dan Eksternal	C	bukti yang dikumpulkan tidak relevan, kompeten dan cukup	Inspektorat Daerah, Pemerintah Daerah

Keterangan

- Kolom a diisi dengan nomor unit
- Kolom b diisi dengan kegiatan, tujuan kegiatan, dan sasaran kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKA SKPD
- Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan/sasaran kegiatan
- Kolom d diisi dengan tahapan kegiatan
- Kolom e diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko
- Kolom f diisi dengan Kode risiko
- Kolom g diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/berkepentingan untuk mengelola risiko
- Kolom h diisi dengan penyebab timbulnya risiko, Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine* , dan *Material*
- Kolom i diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)
- Kolom j diisi dengan C, jika unit kerja mampu mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan penyebab risiko
- Kolom k diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum
- Kolom l diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

Hasil Analisis Risiko

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah		: Inspektorat Daerah												
Tahun Penilaian : 2024		: 2024												
Tujuan Strategis : Terwujudnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah yang handal		: Terwujudnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah yang handal												
Urusan Pemerintahan : Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Meningkatkan		: Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Meningkatkan												
Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Umum		: Urusan Pemerintahan Umum												
		"Risiko" yang Teridentifikasi												
		Resiko		Kode Risiko		Analisis Risiko Sebelum Pengendalian			Pengendalian yang telah ada (pengendalian terpasang)			Analisis Risiko pasca pengendalian		
No.	Program/Kegiatan					Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko				Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c		d		c	d	e				c	d	e
I	Risiko Operasional													
	Kemitraan Inspektorat Dengan Aparat Penegak Hukum	Keterbatasan kapasitas pengawasan		ROO.24.35.03.01		5	5	25	Pembentukan Irban Investigasi			4	4	19
	Kemitraan Inspektorat Dengan Aparat Penegak Hukum	Pihak yang diperiksa tidak kooperatif		ROO.24.35.03.02		5	5	25	Permintaan data melalui APH			4	4	19

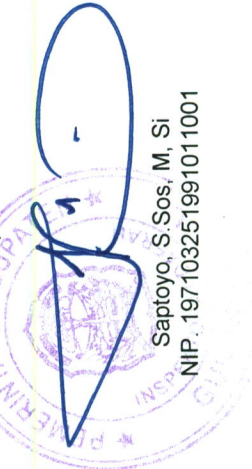
Daftar Risiko Prioritas

Nama Perangkat Daerah		: Inspektorat Daerah							
Tahun Penilaian		: 2024							
Tujuan Strategis		: Terwujudnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah yang handal							
		: Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Meningkat							
Urusan Pemerintahan		: Urusan Pemerintahan Umum							
No	Program/Kegiatan	Risiko Prioritas			Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak	
			Risiko	Kode Risiko					
a	b				c	d	e	f	g
I Risiko Operasional									
1	Kemitraan Inspektorat Dengan Aparat Penegak Hukum	Keterbatasan kapasitas pengawasan		ROO.24.35.03.01	19	Inspektur	Kurangnya sumber daya Tim Investigasi	penyelesaian penanganan aduan tidak tepat waktu	
2	Kemitraan Inspektorat Dengan Aparat Penegak Hukum	Pihak yang diperiksa tidak kooperatif		ROO.24.35.03.02	19	Inspektur	Kebutuhan data berkenaan dengan pihak ketiga	bukti yang dikumpulkan tidak relevan, kompeten dan cukup	

**Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan
(RTP atas Hasil Identifikasi Risiko)**

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah									
Tahun Penilaian : 2024									
Tujuan Strategis : Terwujudnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah yang handal									
: Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Meningkat									
Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Umum									
		Risiko Prioritas			Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penangung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
No	Program/Kegiatan	Risiko	Kode Risiko						
a	b		c	d	e	f	g	h	
I Risiko Operasional									
1	Kemitraan Inspektorat Dengan Aparat Penegak Hukum	Keterbatasan kapasitas pengawasan	ROO.24.35.03.01	Pembentukan Irban Investigasi	Keterbatasan sumber daya	Penyusunan PKPT berbasis Risiko; Penyusunan Pedoman Penugasan Investigasi; Penyusunan Prioritas Pengawasan	Irban Investigasi	Januari-Desember	
2	Kemitraan Inspektorat Dengan Aparat Penegak Hukum	Pihak yang diperiksa tidak kooperatif	ROO.24.35.03.02	Permintaan data melalui APH	Keterbatasan data yang disajikan	Penguatan koordinasi dengan APH untuk mempermudah penelusuran data; Penggunaan Ahli	Irban Investigasi	Januari-Desember	

Gunungkidul, 2 Januari 2024
Ketua UPR Inspektorat Daerah



Saptoyo, S.Sos, M, Si
NIP. 197103251991011001